



**PENGARUH DANA DEKONSENTRASI LINGKUNGAN HIDUP,
KEPADATAN PENDUDUK, PERUMAHAN, TRANSPORTASI DARAT
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
TAHUN 2011-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Ananda Devy Karnila

7111415111

**EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



NIP. 198502162008122004

Pembimbing

Dr. Amin Pujiati S.E., M.Si

NIP. 196908212006042001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Agustus 2019

Penguji I

Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si

NIP 196812091997022001

Penguji II

Prasetyo Ari Bowo, S.E. M.Si

NIP 197902082006041002

Penguji III

Dr. Amin Pujiati, S.E.M.Si

196908212006042001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., PhD.

NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Devy Karnila

NIM : 7111415111

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Oktober 1997

Alamat : Jalan Taman Borobudur Utara RT 05/X, Semarang Barat

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari karya tulis orang lain. Pendapat dan temuan dari orang lain yang tertulis di dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2019



Ananda Devy Karnila
NIM : 7111415111

MOTTO, DAN PERSEMBAHAN

Motto

Berdoa bukan tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain.

Persembahan

Tulisan ini penulis persembahkan kepada :

- Ibu saya Wiwik Rachniarwati, Bapak saya Kasmin, dan Kakak saya Chania Pratwi Dela Arum Sari, serta rekan-rekan.
- Almamater

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Muhammad, Nabi penutup zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *Yaummidin* kelak. Tabik serta doa terbaik untuk Bung Karno dan para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, semoga api semangatnya tetap membara di setiap dada yang masih gandrung akan kebenaran.

Syukur selalu tak luput penulis ingat sehingga bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2011-2017”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, motivasi, bimbingan, nasihat, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah mengajarkan arti penting memperjuangkan demokrasi.
2. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan dukungan.
3. Fafurida, S.E., M.Sc. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan dukungan.

4. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si, Dosen Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu, memberi arahan, masukan, saran, dan semangat selama penyusunan skripsi.
5. Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M.Si. sebagai penguji I ujian skripsi.
6. Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si. sebagai penguji II ujian skripsi
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan moral akademis yang bermanfaat.
8. Kedua Orang Tua, Saudara penulis atas dukungan, semangat, serta kasih sayang yang diberikan.
9. Saudara seperjuangan satu angkatan Ekonomi Pembangunan 2015, Ekonomi Pembangunan B 2015, Hima Ekonomi Pembangunan Unnes Periode 2016 dan 2017.
10. Teman dan saudara yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, Novia Tanti Vidyasari, Triani Nurbaeti, Ismi Nur Azizah, Georgius Lingga Prasto, Muhammad Imron, dan Nailul Ilma Kustiya.

Penulis sudah berupaya secara maksimal pada penulisan skripsi ini, tetapi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Diharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca atau penulis selanjutnya.

Semarang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Cakupan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis	14
1.7 Orisinilitas Penelitian.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	15
2.1.1 Teori Kebijakan Fiskal.....	16
2.1.2 Asas dan Fungsi Desentralisasi Fiskal	15
2.1.3 Dekonsentrasi.....	17
2.1.4 Tujuan Dekonsentrasi	19
2.1.5 Tinjauan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	20
2.1.5.1 Definisi IKLH	20
2.1.5.2 Indikator IKLH	21
2.1.5.3 Pengukuran IKLH	22
2.1.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi IKLH	25
2.1.6 Tinjauan tentang Dana Dekonsentrasi LH.....	25
2.1.6.1 Definisi Dana Dekonsentrasi LH	25
2.1.6.2 Arah Kebijakan Dana Dekonsentrasi LH	26
2.1.6.3 Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi LH	27
2.1.7 Tinjauan tentang Kepadatan Penduduk.....	28
2.1.7.1 Definisi Kepadatan Penduduk	28
2.1.7.2 Faktor – Faktor Kepadatan Penduduk	29
2.1.8 Tinjauan tentang Perumahan.....	30
2.1.8.1 Definisi Perumahan	30
2.1.8.2 Tujuan dan Aspek Pembangunan Perumahan	30
2.1.9 Tinjauan tentang Transportasi Darat.....	32
2.1.9.1 Definisi Transportasi Darat	32

2.1.9.2 Jenis Alat Angkut Transportasi Darat	33
2.1.9.3 Faktor yang Mempengaruhi Transportasi Darat	33
3.1.10 Tinjauan tentang Indeks Pembangunan Manusia	34
3.1.10.1 Definisi IPM	34
3.1.10.2 Perhitungan IPM	36
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kajian Variabel Penelitian	40
2.4.1 Pengaruh DLH terhadap IKLH	40
2.4.2 Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap IKLH	41
2.4.3 Pengaruh Perumahan terhadap IKLH	42
2.4.4 Pengaruh Transportasi Darat terhadap IKLH	42
2.4.5. Pengaruh IPM terhadap IKLH	43
2.4 Kerangka Berpikir	42
2.5 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian	45
3.2 Definisi Operasional.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data	49
3.6 Uji Hipotesis	51
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi	51
3.7.2 Uji Koefisien Regresi Individual	52

3.7.3 Uji Signifikasi Secara Bersama-sama	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Variabel Yang Digunakan	54
4.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54
4.1.2. Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup	57
4.1.3. Kepadatan Penduduk	61
4.1.4. Perumahan	63
4.1.5. Transportasi Darat	65
4.1.6. Indeks Pembangunan Manusia	67
4.2 Pengaruh DLH, KP, PP, TD, IPM terhadap IKLH	69
4.2.1. Penaksiran Model.....	69
4.2.2. Uji Statistik	70
4.2.2.1. Koefisien Determinasi	70
4.2.2.2. Uji F-statistik	71
4.2.2.3. Uji t-Statistik	72
4.3 Pembahasan	74
4.3.1. Pengaruh DLH, KP, PP, TD, IPM terhadap IKLH di Indonesia Tahun 2013-2017	74
4.3.2. Pengaruh DLH terhadap IKLH di Indonesia 2013-2017	75
4.3.3. Pengaruh KP terhadap IKLH di Indonesia 2013-2017	77
4.3.4. Pengaruh PP terhadap IKLH di Indonesia 2013-2017	80
4.3.5. Pengaruh TD terhadap IKLH di Indonesia 2013-2017	84
4.3.6. Pengaruh IPM terhadap IKLH di Indonesia 2013-2017	88

BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DARTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rentang Nilai IKLH	23
Tabel 4.1 Uji t-statistik	73
Tabel 4.2 Konsumsi Akhir Energi Menurut Sektor	81
Tabel 4.3 Produksi BBM Menurut Jenis di Indonesia 2015-2017	85
Tabel 4.4 Konsumsi BBM Menurut Jenis di Indonesia 2013-2017	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 IKLH Indonesia Tahun 2011-2017	3
Gambar 1.2 Dana Dekonsentrasi LH Indonesia Tahun 2011-2017	5
Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2011-2017	5
Gambar 1.4 Presentase Perumahan Perkotaan Indonesia 2011-2017	6
Gambar 1.5 Jumlah Transportasi Darat Indonesia Tahun 2011-2017	7
Gambar 1.6. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2011-2017	9
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 4.1 IKLH 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2017	55
Gambar 4.2 Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup 31 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2017	58
Gambar 4.3 Kepadatan Penduduk 31 Provinsi di Indonesia 2011-2017	62
Gambar 4.4 Presentase Perumahan 31 Provinsi di Indonesia 2011-2017	64
Gambar 4.5 Jumlah Transportasi Darat 31 Povinsi Indonesia 2011-2017	66
Gambar 4.6 IPM 31 Provinsi di Indonesia 2011-2017	68
Gambar 4.7 Presentase Perempuan Berumur 15-49 Sedang Menggunakan KB di Indonesia Tahun 2011-2017	79

BAB I

PENDAHULUAN

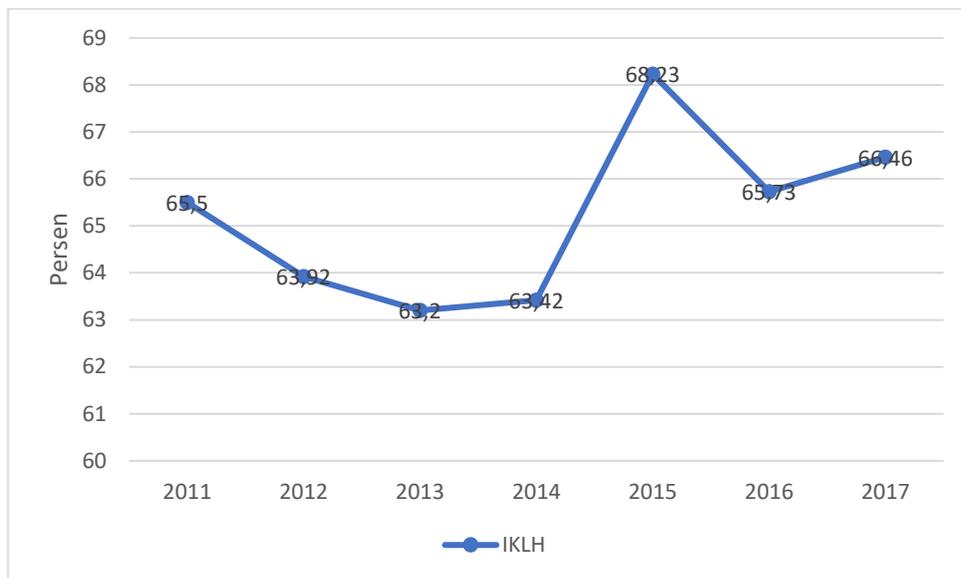
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu menghadapi berbagai permasalahan dalam berbagai bidang seperti, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan berbagai bidang lainnya. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari pengaruh alam maupun aktivitas masyarakat sehari – hari yang akan menimbulkan suatu dampak atau eksternalitas yang bersifat positif maupun negatif. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam melimpah yang setiap harinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian diproduksi menjadi output guna memenuhi kebutuhan dan menambah jumlah pendapatan negara. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan setiap hari dapat menyebabkan eksternalitas atau dampak yang positif seperti, tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan masyarakat dan menambah pendapatan negara. Selain itu, eksternalitas negatif yang ditimbulkan yaitu menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga sebagai akibat dari aktivitas masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat dan kurang berkualitasnya sumber daya manusia. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (ILKH), yang dipublikasikan setiap tahunnya dengan tujuan memberikan kesimpulan terkait

informasi kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam periode waktu 1 tahun di tingkat Nasional dan Provinsi. Selain memberikan kesimpulan informasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disusun sebagai evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu, kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan, dimana setiap indikator memiliki bobot masing-masing. Indikator yang memiliki bobot paling besar yaitu indikator tutupan hutan, yaitu sebesar 40% yang dihitung dari parameter luas hutan. Sedangkan indikator kualitas udara dan air sungai memiliki jumlah bobot yang sama, yaitu sebesar 30% dimana kualitas udara dihitung atas pencemaran SO₂ dan NO₂ yang banyak disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, industri, dan pemukiman. Sedangkan kualitas air dihitung berdasarkan indeks pencemaran dari parameter TTS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal-coli dan total-coliform. Setelah indikator dihitung akan mendapatkan hasil berupa angka indeks sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Semakin jauh angka indeks dari titik referensi 100, maka kualitas lingkungan dinyatakan kurang atau dalam hal ini berarti dalam kondisi tidak baik, dan juga upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan harus semakin didorong. Pembagian rentang ini didasarkan pada persebaran angka dalam perhitungan indeks yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kebijakan dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.



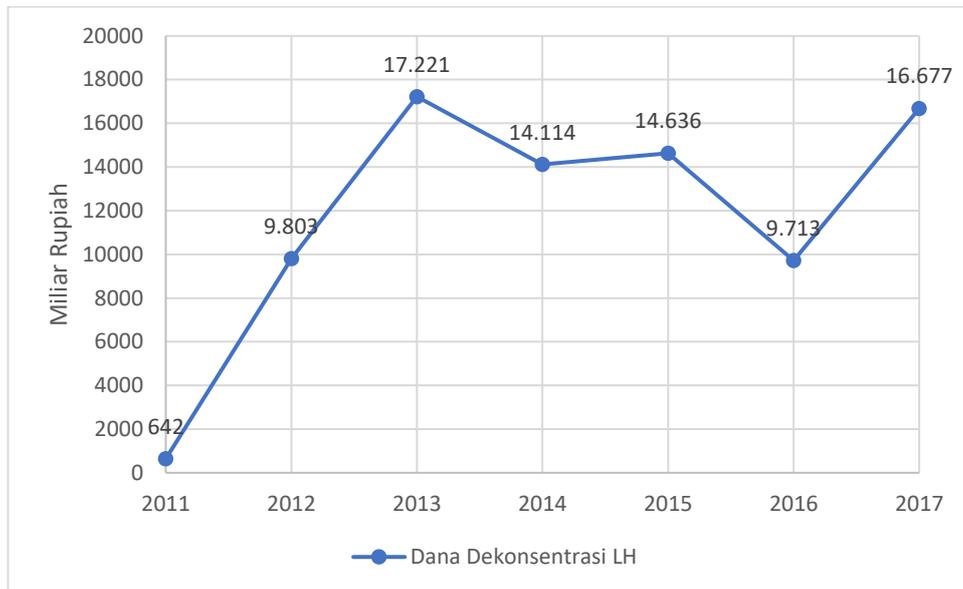
Gambar 1.1. IKLH Indonesia Tahun 2011-2017

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2017

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2017 berfluktuatif dan memiliki tren yang naik, dimana kenaikan sangat signifikan terjadi pada tahun 2017. Meskipun IKLH memiliki tren yang meningkat namun besaran nilai IKLH setiap tahunnya berada dalam kategori kurang, hal ini dikarenakan kurangnya besaran angka IKLH dari angka 66. Pada tahun 2011, kasus pencemaran lingkungan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dimana salah satunya kasus banjir naik sebesar 11% dengan kasus sebanyak 378 yang tersebar di Provinsi Indonesia. Naik nya kasus pencemaran pada tahun 2011 juga berdampak kepada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2012 dimana kasus pencemaran banyak disebabkan oleh aktivitas pembangunan. Mulainya pembangunan PLTA Peusang pada tahun 2013, dimana proyek tersebut merupakan proyek yang tertunda selama 12 tahun mulai dikerjakan dan menghabiskan waktu 42 bulan untuk diselesaikan. Disamping

proyek PLTA, pemerintah juga merealisasikan sebanyak 82 proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang tersebar di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Selain itu, kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya juga mengakibatkan kualitas lingkungan menurun khususnya Provinsi Kalimantan, Riau dan sekitarnya, menurunnya kualitas lingkungan di Pulau Jawa dan sekitarnya disebabkan karena pada tahun 2015 telah mulainya pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi.

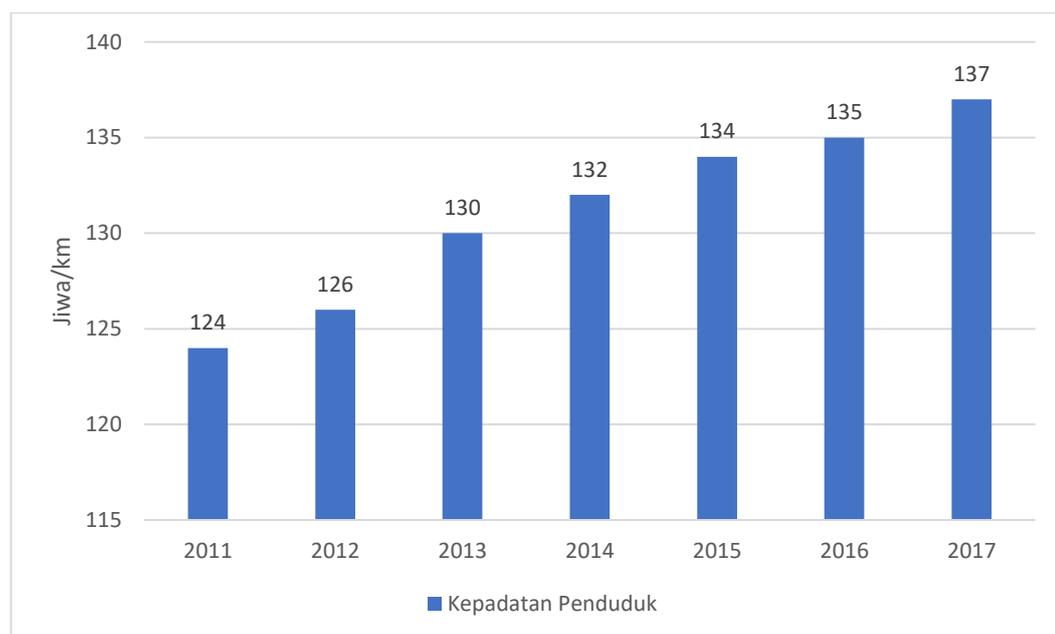
Peran pemerintah dalam mengelola dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dimana sektor lingkungan merupakan salah satu sektor dalam prioritas negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur atau Kepala Instansi pada suatu wilayah untuk menetapkan prosedur, norma, standar, dan kriteria pelaksanaan dekonsentrasi, maka dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 yaitu tentang juknis penyelenggaraan dekonsentrasi lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaannya yaitu dengan mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada setiap Provinsi, dengan melalui program yang ada dan dilaksanakan oleh sub-sub bidang yang ada.



Gambar 1.2.
Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2011-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.2. dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus fungsi lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2017 berfluktuatif cenderung meningkat. Hal ini memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian (Orchidea, Mulatsih, & Purnamadewi, 2016) mengatakan bahwa dana dekonsentrasi fungsi lingkungan hidup mempengaruhi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia, dimana signifikannya realisasi dana dekonsentrasi lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia dengan taraf kepercayaan 5%. Tetapi pada tahun 2011-2017 Dana dekonsentrasi fungsi lingkungan hidup di Indonesia belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia. Selain dana alokasi khusus lingkungan hidup yang berdampak kepada

angka indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia, ada beberapa indikator lain yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya yang berdampak pada kepadatan penduduk di Indonesia.

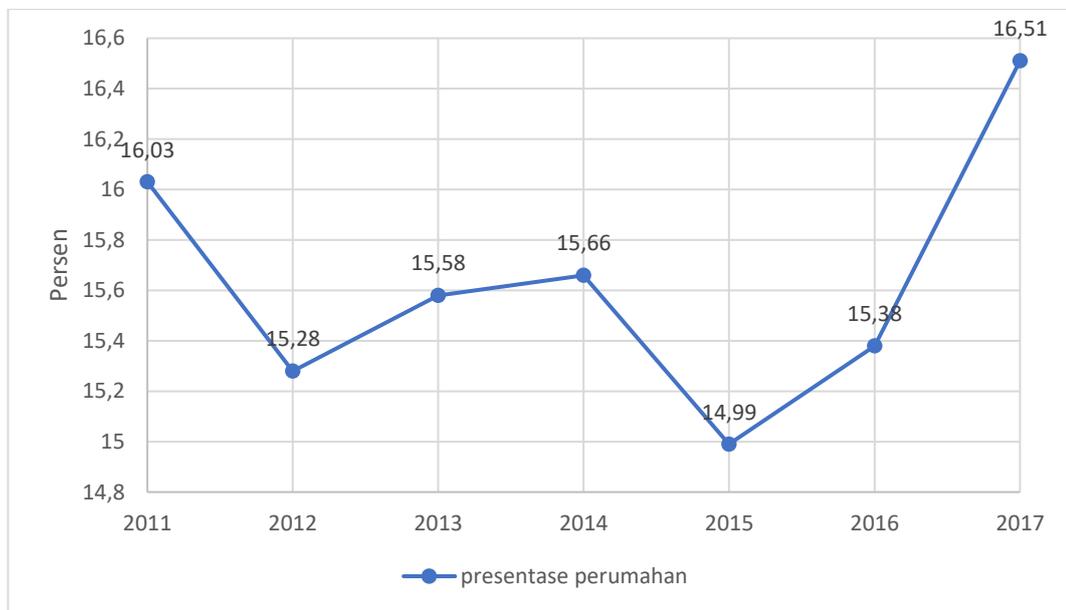


Gambar 1.3. Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2011-2017

Sumber : Statistik Indonesia 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.3. dapat dilihat bahwa jumlah kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2011-2017 setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, dimana menurut BPS pada tahun 2017 mencapai 261.890,9 ribu jiwa. Meningkatnya kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2011-2017 berpengaruh terhadap kurangnya angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia, karena seiring bertambahnya kepadatan penduduk setiap tahunnya akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup yang ada, dan mengakibatkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga akan

menimbulkan berbagai jenis limbah mulai dari limbah cair yang akan berdampak pada kualitas air, hingga limbah padat dan gas yang akan mempengaruhi kualitas udara dan tanah. Hal ini di dukung dengan adanya penelitian menurut (Jayanti, 2017) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan penduduk secara simultan berpengaruh terhadap degradasi lingkungan. Meningkatnya kepadatan penduduk akan berdampak kepada jumlah permintaan terhadap perumahan sebagai tempat tinggal.

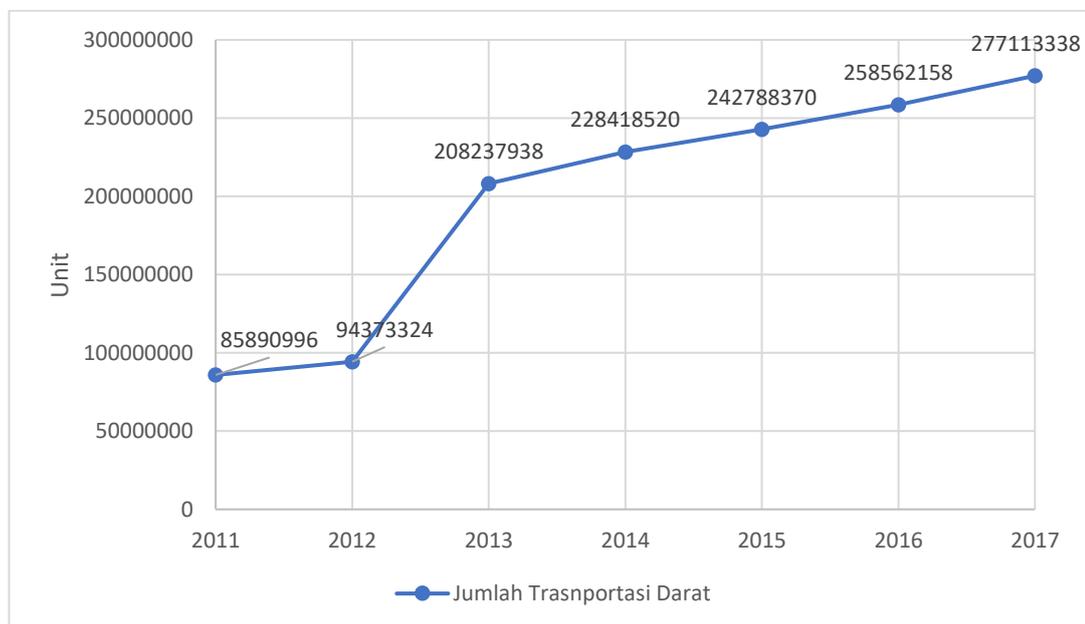


Gambar 1.4. Perumahan Perkotaan di Indonesia Tahun 2011-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah presentase perumahan di perkotaan Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2017 selama lima tahun cenderung meningkat. Peningkatan presentase perumahan akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup karena disamping beralih fungsinya lahan hijau, dan resapan menjadi tempat tinggal juga akan berdampak kepada meningkatnya pemukiman yang kumuh apabila tidak memiliki sarana dan prasarana dasar yang baik, selain itu

pemakaian energi listik akan bertambah, pemakaian pasir dan semen, genting rumah, dan gas yang akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan hidup. Meningkatnya presentase perumahan di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2017 berdampak kepada kurangnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Hal ini di dukung dari hasil penelitian (Yuliasuti & Fatchurochman , 2012) dimana pada lahan yang terbangun pemukiman akan berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan karena meningkatnya pula fasilitas kebutuhan manusia seperti jalan, air bersih, dan sampah yang dihasilkan. Terbangunnya fasilitas jalan raya juga mendorong masyarakat permukiman perumahan untuk menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, dan kendaraan darat lainnya yang juga akan mengganggu kualitas lingkungan.

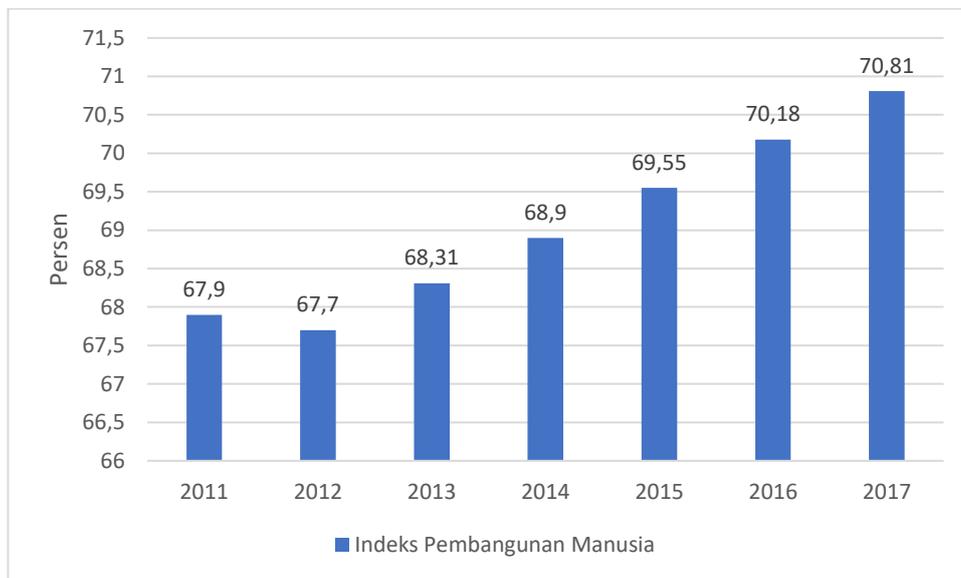


Gambar 1.5. Jumlah Transportasi Darat di Indonesia Tahun 2011-2017
 Sumber : Statistik Transportasi Darat Tahun 2012-2017

Berdasarkan gambar 1.5 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan darat di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2017 setiap tahunnya selalu bertambah.

Menurut (Frinal & Saputra, 2013) penambahan jumlah kendaraan disebabkan karena, kendaraan bermotor cocok sebagai mobilitas yang cepat, mekanisme pembelian yang mudah karena regulasi penjualan yang longgar sehingga masyarakat dapat membayar secara kredit, tidak adanya pembatasan untuk memproduksi kendaraan dan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian (Kusminingrum & Gunawan, 2008) Transportasi merupakan sumber pencemaran terbesar yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor. Hal ini mendukung keadaan di Indonesia karena pada tahun 2011 hingga tahun 2017 jumlah kendaraan di Indonesia selalu meningkat dan berdampak kepada kurangnya Indeks Kualitas Lingkungan.

Selain polusi yang ditimbulkan dari kendaraan, penggunaan bahan bakar kendaraan atau BBM juga mempengaruhi kualitas lingkungan. Hal ini didukung berdasarkan penelitian (Jati, Sugiyanto, & Muryani, 2017) yang menyatakan bahwa eksploitasi BBM atau bahan bakar akan memberikan dampak yang negatif terhadap kualitas air yang disebabkan pencemaran air sumur yang dekat dengan daerah tamban dan residu hasil penambangan minyak dialirkan ke sungai. Menurut (SUSETYO, 2007) eksploitasi bahan bakar minyak tidak akan menghasilkan eksternalitas yang positif akibat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada.



Gambar 1.6. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2011-2017
 Sumber : Statistik Indonesia 2017

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu angka rata – rata keberhasilan utama dalam pembangunan manusia di suatu negara yang dilihat dari umur panjang dan kesehatan, memiliki pengetahuan dan standar hidup yang baik/layak. Indeks Pembangunan Manusia di suatu negara dianggap sangat penting karena dapat mempengaruhi pembangunan negara melalui teknologi, penemuan inovasi – inovasi produk, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Berdasarkan gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata. Berdasarkan hasil penelitian (Pujiati, Santosa, Sarungu, & Soesilo, 2015) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di Indonesia karena semakin banyaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi maka tindakan akan melindungi lingkungan semakin banyak karena orang yang berpendidikan tinggi cenderung mengetahui faktor yang menyebabkan degradasi lingkungan serta mengetahui cara dan kebijakan yang

harus dilakukan. Hal ini bertolakbelakang karena peningkatan IPM yang terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2017 belum menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia membaik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Meningkatnya dana dekonsentrasi fungsi lingkungan hidup di Indonesia tahun 2011-2017 belum menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia dalam kategori baik.
2. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2011-2017 berdampak kepada kurangnya Indeks Kualitas Lingkungan di Indonesia (IKLH), karena semakin banyaknya limbah yang dihasilkan, dan eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat guna memenuhi kebutuhan hidup.
3. Peningkatan presentase perumahan di Indonesia tahun 2011-2017 yang berdampak kepada berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai akibat pembangunan perumahan, mengakibatkan pemukiman kumuh sehingga mengakibatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia tidak dalam kategori baik.
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2011-2017 belum memberikan pengaruh terhadap kurangnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka cakupan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Mengkaji variabel dana dekonsentrasi lingkungan hidup, kepadatan penduduk, perumahan, jumlah kendaraan darat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di indonesia terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia
2. Periode waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 2011-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka didapat perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah faktor dana dekonsentrasi lingkungan hidup berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)?
2. Bagaimanakah faktor Kepadatan Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)?
3. Bagaimanakah faktor Perumahan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ?
4. Bagaimanakah faktor Transportasi Darat berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ?
5. Bagaimanakah faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh dana dekonsentrasi lingkungan hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
3. Untuk menganalisis pengaruh Perumahan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
4. Untuk menganalisis pengaruh Transportasi Darat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
5. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan khususnya ekonomi lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kebijakan publik, terutama kepada akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana dekonsentrasi fungsi lingkungan hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai masukan dan evaluasi bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Dinas/Badan yang menaungi khusus lingkungan hidup sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup di Indonesia.

1.7 Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu antara lain, cakupan lokasi penelitian yaitu se Indonesia, adanya variabel presentase perumahan, dan jumlah kendaraan darat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan *pooled data*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Kebijakan Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Bird dan Vallaincourt dalam buku Kuncoro (2014) yaitu langkah yang diambil negara untuk mengatur sektor publik yang mencerminkan tentang sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik lain yang berbeda disetiap negara. Isu dalam kebijakn fiskal yang diperdebatkan yaitu alokasi fungsi fiskal, efektifitas penugasan penerimaan, pajak yang tepat, peran dana transfer pemerintah, dan peralihan tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut (Hadi & Saragih, 2013) konsep desentralisasi fiskal yaitu, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat akan diberikan atau membagi kewenagannya kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah yaitu pemerintah daerah Propinsi atau pemerintah Kota/ Kabupaten melalui peraturan perundang – undangan. Dalam konsep ini atau konsep otonomi daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu urusan absolut dimana urusan ini bersifat mutlak oleh pemerintah pusat yang berperan sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi, sehingga urusan tersebut tidak bisa diberikan kepada pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan yang tidak dapat dilimpahkan yaitu mengenai pembentukan norma, standar dan prosedur yang dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Karena urusan absolut tidak dapat didesentralisasikan, maka urusan absolut dapat

didekonsentrasikan dengan dibantukan pada pemerintah daerah. Sedangkan urusan relatif yaitu urusan yang dapat disentralisasikan pada pemerintah daerah. Dalam urusan relatif terdapat hubungan kewenangan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang tingkatnya dibawah pemerintah pusat untuk mengelola sumber keuangan.

2.1.2 Asas dan Fungsi Desentralisasi Fiskal

Menurut (Kuncoro, 2014) desentralisasi fiskal berpijak kepada 3 (tiga) asas desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantu.

Hubungan keuangan pusat ke daerah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu :

1. Urusan tugas pemerintah pusat di daerah mengenai dekonsentrasi yang pembiayaannya berasal dari APBN.
2. Urusan tugas pemerintah daerah mengenai desentralisasi yang pembiayaannya berasal dari APBD.
3. Urusan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenai tugas pembantu yang pembiayaannya oleh pemerintah pusat atas beban APBN dan pembiayaannya oleh pemerintah daerah atas bebas APBD selaku pihak yang menugaskan.
4. Pemerintah pusat memberikan sumbangan apabila sumber keungan daerah belum tercukupi.

Perimbangan keuangan yang mencakup pembagian keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara adil, demokratis, proposional, dan transparan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan setiap daerah. Pada hakekatnya pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu; distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Pada fungsi distribusi dan stabilisasi akan lebih tepat dan efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada fungsi alokasi, dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui tentang kondisi, situasi, dan kebutuhan daerahnya.

2.1.3 Dekonsentrasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan yang dimaksud dengan dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk vertikal pusat di daerah. Ruang lingkup dekonsentrasi meliputi aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi diatur dalam Bab II pasal 2 tentang Prinsip Penyelenggaraan berbunyi :

“(1) Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/Lembaga.

(3) Penyelenggaraan tugas pembantu dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa.

(4) Kementerian/Lembaga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantu.”

Mengenai pembagian urusan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan-urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah/Kota. Pada pasal 2 ayat (4) PP.NO.38 Tahun 2007 berbunyi :

“Bahwa urusan yang dapat dibagi yaitu; a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak; l. keluarga berencana dan juga keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o. koperasi

dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan dan kepariwisataan; r. kepemudaan dan olah raga; s. kesatuan bangsa dan politik di dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan yang ada di daerah, perangkat-perangkat daerah, kepegawaian, dan juga masalah persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. statistik; w. kearsipan; dan x. perpustakaan-perpustakaan; y. komunikasi dan informatika; dan yang terakhir adalah z. pertanian dan ketahanan pangan; yaitu yang merupakan: a. kehutanan; b. energi dan sumber daya mineral; c. kelautan dan perikanan; d. perdagangan; dan e. perindustrian.”

2.1.4 Tujuan Dekonsentrasi

Menurut Suwandi dalam Pitono (2012) pemerintah dalam penerapan kebijakan dekonsentrasi ingin mencapai tujuan utama yaitu, tujuan politis dan tujuan administrative. Tujuan politis kebijakan dekonsentrasi yaitu :

1. Melalui kebijakan dekonsentrasi, pemerintah memberi tugas kepada aparat daerahnya untuk memusyawarahkan aspirasi daerah kepada pemerintah.
2. Adanya pemerintah daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah oleh daerah.
3. Jika terjadi penolakan kebijakan dan muncul adanya tekanan di daerah terhadap pemerintah pusat mengenai isu, maka pemerintah akan memberi tugas kepada aparat daerah untuk mengatasi tekanan tersebut.

Tujuan administrasi kebijakan dekonsentrasi yaitu :

1. Pejabat pelaksana dekonsentrasi harus mengetahui kebutuhan daerah agar program – program pembangunan dapat tersusun sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Dengan adanya pejabat daerah, pejabat pusat akan memberi tugas untuk mencari tahu potensi yang ada di daerah dan selanjutnya akan dikembangkan untuk kepentingan nasional dan daerah tersebut.
3. Pejabat pusat dapat menugaskan pejabat daerah guna membantu terlaksananya program pusat yang bersasaran di daerah, melalui cara ini maka pengelolaan akan semakin efektif dan efisien.
4. *Speed of action* suatu program atau kebijakan pusat akan lebih terjamin dengan adanya kebijakan dekonsentrasi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dekonsentrasi yang berarti pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dalam penyusunan program akan sesuai dengan kebutuhan di daerah, serta berkembangnya potensi daerah. Selain itu melalui kebijakan dekonsentrasi, program pemerintah pusat akan cepat terlaksana secara efektif dan efisien.

2.1.5 Tinjauan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.1.5.1. Definisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah suatu kesimpulan informasi yang memuat

kondisi lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu biasanya 1 (satu) tahun, yang selanjutnya angka indeks akan diterjemahkan pada suatu kondisi yang baik atau sebaliknya. Semakin jauh angka indeks dengan angka 100, mengartikan bahwa upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup harus semakin ditekan.

Sedangkan menurut (Federal Environment Agency, 2007) indeks kualitas lingkungan adalah skor untuk diartikan ke beberapa kategori, dan mengukur seberapa negara dalam pemenuhan kebijakan lingkungan atau keberhasilan kebijakan lingkungan. Tujuan dari pengukuran indeks kualitas lingkungan yaitu untuk peningkatan kondisi keberhasilan dalam kebijakan lingkungan.

2.1.5.2. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) indikator indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air

Metode untuk menentukan indeks kualitas air diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, dengan menggunakan metode indeks pencemaran air sungai. Titik pantau pada waktu dan lokasi pemantauan kualitas air sungai dianggap satu sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, *Total Coliform*, dan *Fecal Coli*.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan pencemar utamanya yang terdiri dari 5 (lima) pencemar, yaitu ozon di permukaan, karbon monoksida, bahan partikel, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan dihitung dari penjumlahan 5 (lima) indeks, diantaranya yaitu indeks tutupan hutan, indeks *performance* hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat.

2.1.5.3. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia mengadopsi dari konsep *Environmental Quality Index (EQI)* yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University (VCU)*. Indeks kualitas lingkungan hidup dihitung di tingkat provinsi agar menghasilkan indeks kualitas lingkungan hidup tingkat nasional. Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Dalam menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan pada provinsi, diperlukan metode perhitungan di setiap indikatornya dimana setiap indikator memiliki formula yang berbeda – beda. Formula untuk menghitung indikator indeks kualitas lingkungan hidup yaitu :

1. Indeks Kualitas Air

Formula atau rumus dalam perhitungan Indeks Kualitas Air adalah sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

Keterangan :

IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukan j

C_i = Konsentrasi parameter kualitas air i

L_{ij} = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j

M = Maksimum

R = Rerata

2. Indeks Kualitas Udara

Formula atau rumus dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan dengan standar *European Union (EU) Directives*. Jika nilai indeks >1 artinya kualitas udara melebihi standar EU, dan sebaliknya jika <1 maka kualitas udara memenuhi standar EU. Lalu indeks udara modes *European Union (EU)* diubah menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan persamaan :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$$

Asumsi dari rumus tersebut yaitu data kualitas udara yang dihitung merupakan data konsentrasi pencemar, yang harus diubah atau dikonversikan dengan cara melakukan pengurangan dari 100 persen.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Formula atau rumus dalam perhitungan Indeks Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks *Performance* Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

Setelah menghitung angka indeks dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka formula atau rumus untuk menghitung IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH_{Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Keterangan :

IKLH_{Provinsi} = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi

IKA = indeks kualitas air

IKU = indeks kualitas udara

IKTL = indeks kualitas tutupan lahan

Setelah mendapatkan hasil angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) maka angka indeks dapat disimpulkan dalam beberapa kategori menurut rentang nilainya.

Berikut merupakan rentang indeks kualitas lingkungan hidup :

Tabel 3.1.

Rentang Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH					
Unggul			X	>	90
Sangat Baik	82	<	X	≤	90
Baik	74	<	X	≤	82
Cukup	66	≤	X	≤	74
Kurang	58	≤	X	<	66
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58
Waspada			X	<	50

Sumber:Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

2.1.5.4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut (Fakher, 2019) ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terutama pada negara berkembang yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan negara/ GDP
3. Jumlah angka kematian dan kelahiran
4. Politik negara yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil
5. Investasi asing
6. Transportasi
7. Konsumsi energi perkapita

2.1.6 Tinjauan tentang Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup

2.1.6.1. Definisi Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup yaitu, pelimpahan wewenang untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan menurut (Orchidea, Mulatsih, & Purnamadewi, 2016) dana dekonsentrasi lingkungan hidup adalah alokasi dana yang diharapkan dapat memenuhi target pada bidang pengelolaan lingkungan, seperti tercapainya pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran, dan peningkatan kelembagaan lingkungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana dekonsentrasi lingkungan hidup yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan cara menganggarkan dana dari pemerintah pusat kepada daerah atas dasar pelimpahan sebagian wewenang guna pengelolaan dan perlindungan lingkungan di daerah.

2.1.6.2. Arah Kebijakan Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup

Arah kebijakan dana dekonsentrasi lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Bab II Pasal 4, yang berbunyi :

“ a. percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terdiri atas:

1. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup akibat meningkatnya aktivitas pembangun;

2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan

3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP.

b. peningkatan kerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan.”

Berdasarkan bunyi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup pada Bab II Pasal 4, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan dana dekonsentrasi lingkungan hidup berarahkan kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar berkelanjutan.

2.1.6.3. Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi lingkungan hidup dilaksanakan melalui adanya program untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Bab V Pasal 10 Ayat 2 yang berbunyi :

“ Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. sub-sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL);
- c. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- e. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakhra hutan dan/atau lahan;

- f. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomssa;
- g. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup;
- h. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan;
- i. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfer; dan
- j. sub-sub bidang keanekaragaman hayati.”

Berdasarkan bunyi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup pada Bab V Pasal 10 Ayat 2, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi lingkungan hidup dilakukan melalui program yang terdiri dari 10 (sepuluh) sub – sub bidang, dimana pada setiap bidang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

2.1.7 Tinjauan tentang Kepadatan Penduduk

2.1.7.1. Definisi Kepadatan Penduduk

Definisi kepadatan penduduk menurut (Badan Pusat Statistik, 2019) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Kepadatan penduduk kasar, menunjukan jumlah penduduk setiap kilometer persegi luas wilayah.
2. Kepadatan fisiologis, menunjukan jumlah penduduk setiap kilometre persegi untuk wilayah lahan yang ditanami.

3. Kepadatan agraris, menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani untuk setiap kilometre persegi wilayah yang ditanami.

2.1.7.2. Faktor – Faktor Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat diukur melalui jumlah penduduk, menurut (Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan, 2015) faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk adalah :

1. Natalitas atau Kelahiran
2. Mortalitas atau Kematian
3. Migrasi atau Perpindahan Penduduk

Sedangkan menurut (sukirno, 2014) faktor yang menyebabkan cepetnya perkembangan penduduk pada negara berkembang dijelaskan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perkembangan penduduk yang terjadi antara tahun 1900 – 1920, dimana tingkat perkembangan penduduk lambat, artinya jumlah penduduk tidak selalu berkembang karena adakalanya jumlah penduduk berkurang sebagai akibat wabah penyakit atau kelaparan. Pada tahap kedua antara tahun 1911-1913 dan 1957-1963 negara yang relatif kaya, tingkat kelahirannya rendah dengan diiringi tingkat kematian yang menurun. Dengan negara yang pendapatannya tidak terlalu tinggi, tingkat kelahirannya tinggi dengan diiringi tingkat kematian tinggi pula. Lalu pada tahap tiga yaitu periode 1960 an jumlah penduduk dapat meningkat hingga 8 kali lipat. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penambahan penduduk yaitu dari kelahiran dan kematian.

2.1.8 Tinjauan tentang Perumahan

2.1.8.1. Definisi Perumahan

Definisi perumahan menurut (Soesilowati, 2015) adalah kumpulan dari rumah-rumah yang berfungsi sebagai tempat manusia dalam bermukim dan melangsungkan hidupnya.

Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah yang merupakan bagian dari perkukiman baik di perkotaan ataupun perdesaan yang lengkap dengan sarana, prasarana sebagai upaya rumah yang layak huni.

Definisi lain perumahan menurut (Keman, 2005) adalah suatu kelompok rumah yang memiliki fungsi sebagai tempat hunian atau tempat tinggal lengkap dengan adanya prasarana lingkungan seperti penyediaan air minum, pembuangan sampah, energi listrik, jalan raya dan fasilitas lain guna menunjang aktivitas ekonomi. Perumahan yang layak huni harus memenuhi syarat kesehatan agar penghuni atau keluarga tetap sehat. Perumahan yang sehat merupakan faktor untuk meningkatkan standar kesehatan. Konsep tersebut berorientasi terhadap bangunan perumahan, lokasi perumahan, penggunaan serta pemeliharaan lingkungan perumahan dan juga mencakup penyediaan air minum layak konsumsi dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, penyimpanan makanan serta pembuangan limbah maupun kotoran manusia.

2.1.8.2. Tujuan dan Aspek Pembangunan Perumahan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Tujuan dari penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yaitu ;

- a. Kepastian hukum dalam menyelenggarakan perumahan dan pemukiman
- b. Guna mendukung penataan pengembangan wilayah atas persebaran penduduk yang proposional sesuai dengan tata ruang.
- c. Sebagai peningkatan daya guna dan hasil sumber daya alam bagi perumahan dengan memperhatikan lingkungan.
- d. Pemberdayaan kepentingan bidang pembangunan perumahan dan pemukiman
- e. Penunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya
- f. Sebagai penjamin rumah layak huni yang terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terpadu dan berkelanjutan.

Sedangkan aspek pembangunan perumahan menurut (Soesilowati, 2015) melingkupi 3 (tiga) aspek, yaitu : bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan, maksud dari bina manusia yaitu agar warga memiliki hidup yang sehat, adanya kesempatan belajar dan memiliki toleransi dan rasa hormat kepada sesama. Untuk mencapai hidup yang sehat maka dibutuhkannya penghasilan atau pendapatan, sehingga perlu adanya penyelarasan dengan bina usaha. Tetapi bina manusia dan bina usaha tidak dapat menjadi berkelanjutan tanpa di damping oleh bina lingkungan, dimana setiap warga dianjurkan untuk memelihara lingkungan sekitar.

Perumahan dan pemukiman adalah suatu hal yang berkesinambungan, karena pemukiman merupakan kawasan dari perumahan yang disertai dengan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana lingkungan.

2.1.9 Tinjauan tentang Transportasi Darat

2.1.9.1. Definisi Transportasi Darat

Definisi transportasi darat menurut Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik yaitu, pemindahan manusia dan barang ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut yang dapat berupa manusia, binatang, sepeda, dan motor dengan jenis jalan yang digunakan yaitu jalan setapak, tanah, kerikil maupun aspal, dimana tenaga penggerak alat angkut dapat berupa binatang, manusia, uap, diesel dan bahan bakar minyak. Transportasi moda darat memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan, diantaranya yaitu :

Keunggulan :

- a. Fleksibel, karena dapat mengubah arah tujuan.
- b. Kecepatan yang tinggi
- c. Dalam hal pengangkutan barang dapat memuat barang yang berukuran besar

Kekurangan :

- a. Perlu adanya pemeliharaan rutin
- b. Dapat juga menjadi lambat
- c. Sering terjadi adanya penundaan
- d. Menghasilkan polusi yang besar

2.1.9.2. Jenis Alat Angkut Transportasi Darat

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2017) jenis alat angkut transportasi darat yaitu :

1. Kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor milik TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
2. Mobil penumpang, yaitu kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang yang digunakan untuk mengangkut orang dan beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
3. Mobil bus, yaitu kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang dan beratnya lebih dari 3.500 kilogram yang digunakan untuk mengangkut orang.
4. Mobil barang, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang, contohnya seperti truk, dan *pick up*.
5. Sepeda motor, yaitu kendaraan bermotor yang memiliki 2 roda atau roda 3 yang dapat memiliki atau tidak memiliki rumah-rumahan.

2.1.9.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transportasi Darat

Menurut (Salim, 2016, p. 9) faktor yang mempengaruhi transportasi yaitu :

1. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah akan mempengaruhi pengelolaan usaha

transportasi, contohnya yaitu UU yang mengatur tentang Lalu Lintas di jalan raya.

2. Kebijakan/Pengaturan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah akan mempengaruhi usaha transportasi mengenai jumlah pengadaan transportasi, dan jenis yang dipakai

3. Pengaruh pemakaian jasa

Perusahaan transportasi akan memberikan pelayanan dalam penyediaan jasa agar memiliki pelayanan yang baik kepada pengguna jasa, sehingga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan transportasi, maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa permintaan akan perusahaan transportasi akan mempengaruhi penyediaan jasa perusahaan transportasi.

2.1.10. Tinjauan tentang Indeks Pembangunan Manusia

2.1.10.1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Kuncoro, 2018, p. 19) pembangunan manusia terdiri dari 3 produk pembangunan, yaitu usia yang panjang dilihat dari tingkat harapan hidup, pengetahuan yang dilihat dari jumlah orang dewasa yang tidak melek huruf (dengan pemberian bobot $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan pemberian bobot $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), dan pendapatan atau penghasilan dilihat dari pendapatan perkapita riil, yaitu berdasarkan daya beli.

Pengertian indeks pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu ringkasan ukuran rata-rata keberhasilan pembangunan manusia meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Panjangnya umur dan kehidupan yang sehat dapat digambarkan melalui angka harapan hidup saat lahir, yaitu dengan jumlah angka kematian bayi. Pengetahuan atau pendidikan dapat digambarkan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan penduduk usia 25 tahun keatas yang menempuh Pendidikan formal. Sedangkan standar hidup yang layak dapat diukur melalui pengeluaran per kapita dan daya beli.

Definisi lain menurut United Nations Development Programme (UNDP) indeks pembangunan manusia adalah pengembangan manusia melalui pembangunan kemampuan manusia, dimana manusia ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kehidupan mereka dan perkembangan manusia harus mempengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Artinya perkembangan manusia bukan hanya di pandan dari sudut pertumbuhan ekonomi saja, tetapi dilihat dari proses perkembangan manusia itu sendiri. Tiga dasar dimensi dari indeks pembangunan manusia yaitu, harapan hidup saat lahir dan kemampuan untuk hidup yang panjang, kemampuan dalam memperoleh pengetahuan serta lamanya waktu sekolah, dan pendapatan nasional burrito per kapita yang menggambarkan kemampuan untuk memiliki kehidupan yang layak.

Maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu usia yang panjang dilihat dari sisi angka harapan hidup, pengetahuan seseorang yang dilihat dari data melek huruf dan

lamanya sekolah bagi orang dewasa pada usia 25 tahun keatas atau yang menempuh Pendidikan formal, serta standar hidup masyarakat yang dilihat berdasarkan daya beli.

2.1.10.2. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2019) formula atau rumusan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia dalah sebagai berikut:

$$IPM = (I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}})^{1/3}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

I_{kesehatan} = Indeks kesehatan

I_{pendidikan} = Indeks Pendidikan

I_{pengeluaran} = Indeks pengeluaran

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Orchidea, Mulatsih, & Purnamadewi, 2016) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis ekonometrika dengan menggunakan data panel. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan menggunakan 3 Variabel independent yaitu Kepadatan Penduduk, Dana dekonsentasi lingkungan hidup, dan

PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi kebijakan dana dekonentrasi lingkungan hidup efektif mempengaruhi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, karena terbukti signifikan dengan taraf kepercayaan 5%. Kemudian pada variabel kepadatan penduduk signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya dana dekonsentrasi lingkungan hidup yaitu jumlah industri, luas tutupan lahan, jumlah kasus aduan lingkungan, kapasitas fiskal dan indeks pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Halkos & Paizanos, 2016) yang berjudul *“The channels of the effect of government expenditure on the environment: evidence using dynamic panel data”*. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif dan analisis ekonometrika dengan menggunakan data panel dari 94 negara dari tahun 1970-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah signifikan pada pengurangan pencemaran udara terutama di negara maju. Sedangkan pada negara berkembang, efek pengeluaran pemerintah terhadap kualitas lingkungan hidup dapat diperkuat dengan mengurangi distorsi kebijakan seperti perlindungan subsidi industri dan energi dengan menegakan hak properti atas sumber daya alam yang menyebabkan eksternalitas lingkungan.

Penelitian yang dilakukan (Samimi, Kashefi, Salatin, & Lashkarizadeh, 2011) yang berjudul *“Environmental performance and HDI: Evidence from Countries Around the World”*. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu, analisis regresi dengan data panel yang mengkombinasikan data *time series* dan

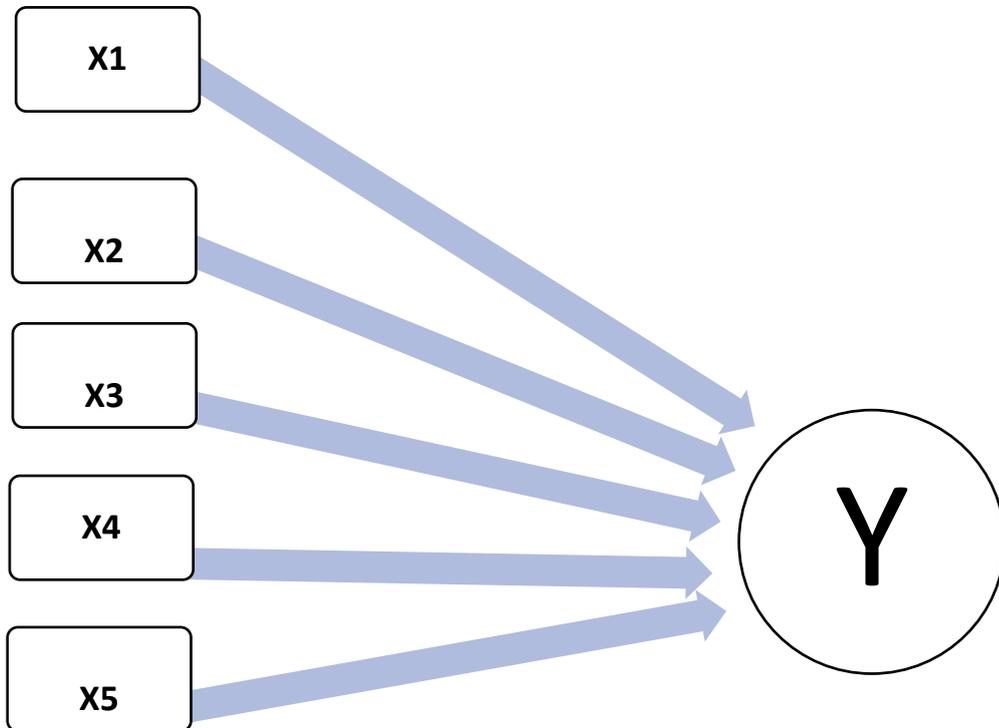
cross section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif serta signifikan antara indeks kualitas lingkungan hidup dengan indeks pembangunan manusia pada seluruh sampel negara maju. Sedangkan pada negara berkembang, menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi belum tentu meningkatkan kualitas lingkungan, maka dari itu perlu adanya kesadaran dari pihak masyarakat serta dukungan dari organisasi internasional seperti PBB penting.

Penelitian yang dilakukan (Tahzib & Zvijáková, 2012) yang berjudul “*Eviromental Impact of Land Transportation*”. Menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas transportasi darat berkaitan dengan masalah lingkungan yang terkait dengan perubahan cuaca, penurunan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tanah. Pada emisi partikel berbentuk debu yang bersal dari knalpot kendaraan akan berdampak kepada kualitas udara, dimana menghasilkan emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang akan membentuk atmosfer senyawa asam dan menciptakan hujan asam. Sehingga terciptanya hujan asam yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya fungsi hutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliasuti & Fatchurochman, 2012) yang berjudul “ Pengaruh Perkembangan Lahan Terbangun Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman” dengan menggunakan metode Teknik analisis, analisis korelatif, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan dimana lahan terbangun atau perumahan jika perkembangannya 0% maka kualitas lingkungannya akan cenderung menurun. Maka diperlukannya minimal 2 persen perkembangan lahan yang disertai dengan kualitas prasarana perumahan

Penelitian yang dilakukan (Pujiati, Santosa, Sarungu, & Soesilo, 2015) yang berjudul “*The Determinants of Green and Non Green City: An Empirical Research in Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu *multinomial logistic regression* dengan mengklasifikasikan kota hijau yaitu kota Semarang, Sleman, Magelang dan Klaten. Selain kota – kota tersebut diklasifikasikan sebagai kota non hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita tidak mempengaruhi klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan, lalu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi dalam klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan, karena semakin tinggi nilai probabilitas pertumbuhan kota maka akan diklasifikasikan sebagai kota yang perumbuhannya tinggi tetapi rendah kualitas lingkungan, hal itu sama dengan variabel tingkat lapangan kerja industri, karena semakin tinggi pertumbuhan kota maka kualitas lingkungan semakin rendah. Sedangkan pada tingkat Pendidikan mempengaruhi pertumbuhan kota yang rendah dengan tingginya kualitas lingkungan.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Keterangan :

→ : Hubungan pengaruh

Y : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

X1 : Dana dekonsentrasi lingkungan hidup

X2 : Kepadatan Penduduk

X3 : Perumahan

X4 : Transportasi Darat

X5 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4 Kajian Variabel Penelitian

2.4.1 Pengaruh Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan fungsi lingkungan salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan insentif dan subsidi yang tersusun dalam Repelita VI tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan dana. Dana yang berasal dari APBN yang telah dianggarkan untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk langsung diperuntukan pengelolaan lingkungan hidup (Suparmoko, 2007:161)

Sedangkan menurut Orchide, Mutlasih dan Purnamadewi (2016) menunjukkan bahwa realisasi dana fungsi lingkungan hidup memiliki hubungan positif terhadap indeks kualitas lingkungan hidup, karena setiap kenaikan 1% realisasi dana fungsi lingkungan hidup akan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 0.097. Hal ini dibuktikan dengan signifikannya realisasi dana fungsi lingkungan hidup terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di daerah tahun 2009-2013 dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%.

Maka dapat disimpulkan bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dilimpahkan wewenangnya pada pemerintah daerah atau yang disebut dengan dana dekosentrasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan karena tujuan alokasi dana untuk mengelola lingkungan.

2.4.2. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Nagdeve dalam Saka (2014) menyatakan bahwa meningkatnya populasi akan menyebabkan kepadatan penduduk, garis kemiskinan dan tekanan pada sumber daya alam. Meningkatnya populasi juga akan mempengaruhi cepatnya pertumbuhan produksi dan konsumsi energi, sehingga akan menyebabkan efek kepada lingkungan seperti polusi udara, pemanasan global, terkontaminasinya air tanah dan air permukaan. Sehingga menurut Nagdeve pertumbuhan populasi memiliki hubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan.

Sedangkan menurut Cropper dan Griffiths (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan menambah tekanan terhadap lingkungan dan menjadi penyebab utama polusi udara, air dan limbah padat. Maka pengendalian populasi adalah sarana penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Cropper dan Griffiths mencontohkan dua negara dengan pertumbuhan populasi yang cepat dengan sumber daya hutan yang sama tetapi tingkat pendapatan perkapita yang berbeda. Dimana negara satu memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi cenderung akan melakukan deforestasi lebih cepat dibandingkan negara yang memiliki pendapatan rendah.

2.4.3. Pengaruh Perumahan Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut Kurdi (2008) menyatakan bahwa perumahan menyababkam emisi CO₂ yang cukup besar, emisi ini disebabkan oleh penggunaan gas, minyak tanah serta bahan bakar untuk transportasi, dimana jumlah emisi yang dihasilkan lebih

besar dibandingkan dari emisi pemakaian listrik dan energi saat proses pembangunan rumah. Kecilnya jumlah emisi CO₂ yang dapat diserap dibandingkan jumlah yang ditimbulkan merupakan akibat dari jumlah ruang terbuka hijau lebih kecil dibandingkan jumlah ruang yang dibangun perumahan. Banyak dari perumahan telah melebihi ketentuan koefisien dasar bangunan, sehingga ruang terbuka hijau menjadi tertutup dan jalan sebagai pengijauan hanya melalui tanaman dalam pot yang secara fungsional tidak memiliki fungsi sebagai daerah resapan air. Selain itu apabila perumahan tidak memiliki sarana dan prasarana dasar yang layak akan mengakibatkan pemukiman sekitar menjadi kumuh dan berujung untuk menurunkan kualitas lingkungan hidup baik dari segi air, udara, maupun tanah.

2.4.4. Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut (Reksohadiprodjo & Brodjonegoro, 2000, p. 61) transportasi bermotor merupakan salah satu sumber dalam pencemaran udara, karena adanya gas buangan yaitu karbonmonoksida yang disebabkan karena tidak sempurnanya proses pembakaran, dan adanya gas nitrogenoksida yang terjadi karena tingginya suhu pembakaran.

Sedangkan menurut Tahzib dan Avijakova (2012) menyatakan bahwa transportasi darat menimbulkan dampak terhadap lingkungan terkait dengan perubahan iklim, kualitas udara, kebisingan, kualitas air, kualitas tanah, sumber daya alam dan lahan. Perubahan iklim terjadi karena transportasi melepaskan jutaan ton gas ke atmosfer seperti, karbon monoksida, timbal, nitro oksida, abu, debu yang

kemudian akan berdampak kepada perubahan iklim. Selain itu, kualitas udara juga terganggu sebagai akibat aktivitas transportasi karena melepaskan emisi gas dan partikel yang akan menimbulkan polusi udara.

Disamping itu, jika emisi gas sulfus dioksida dan nitrogen oksida berada di atmosfer akan membentuk berbagai senyawa asam yang akan menciptakan hujan asam bila tercampur didalam awan. Curah hujan asam memiliki efek merusak lingkungan dan penurunan kualitas hutan. Pada kualitas air, buangan bahan bakar, bahan kimia dan partikel kimia lainnya dari mobil, truk dapat mencemari sungai, danau, lahan basah dan lautan. Dampak bagi kualitas tanah yang disebabkan transportasi darat adalah turunnya kualitas tanah akibat konstruksi jalan raya sehingga kesuburan tanah yang produktif turun atau hilang.

2.4.5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurut agenda 21 global dalam buku (Reksohadiprodjo & Brodjonegoro, 2000, p. 350) pendidikan merupakan hal penting karena akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan serta pentingnya pendidikan nonformal guna pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan menurut Pujiati, Santosa, Sarungu, dan Soesilo (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka akan semakin rendah populasi, karena tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan penyebaran informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang akan lebih dapat memahani informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan degradasi

lingkungan, dan mengetahui tindakan yang harus diambil serta menerapkan instrument untuk dapat melindungi lingkungan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil kajian variable penelitian terdahulu dan kerangka berpikir pada gambar 2.1. maka muncul hipotesis penelitian. Berikut merupakan penjelasan hipotesis dalam penelitian ini.

H1 : Terdapat pengaruh dana dekonstruksi lingkungan hidup terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

H2 : Terdapat pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

H3 : Terdapat pengaruh perumahan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

H4 : Terdapat pengaruh transportasi darat terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

H5 : Terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana dekonsentrasi lingkungan hidup tidak berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia tahun 2011-2017. Hal ini disebabkan karena rendahnya dana dekonsentrasi lingkungan hidup yaitu dengan rata-rata kurang dari 1%, sehingga tidak seimbang dengan kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan yang ada.
2. Kepadatan penduduk signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Indonesia tahun 2011-2017. Ketika kepadatan penduduk meningkat maka indeks kualitas lingkungan hidup akan berkurang, hal ini disebabkan karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia.
3. Presentase perumahan signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia tahun 2011-2017. Ketika persentase perumahan meningkat maka akan menurunkan indeks kualitas lingkungan hidup, karena peningkatan persentase perumahan akan mengurangi ruang terbuka hijau dan daerah resapan.

4. Transportasi darat tidak berpengaruh terhadap indeks kualitas lingkungan hidup dan memiliki hubungan negatif. Hal ini karena upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi emisi masih belum efektif, karena masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
5. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan memiliki hubungan positif. Pada saat Pendidikan semakin tinggi, maka akan semakin banyak inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan juga peningkatan pendapatan, maka pengeluaran untuk mengelola lingkungan akan bertambah.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Rendahnya dana dekonsentrasi lingkungan hidup yang ada, sehingga belum dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, padahal dalam aktivitas pembangunan memberikan dampak kerusakan yang cukup banyak. Upaya yang diperlukan yaitu, Pemerintah dalam penganggaran dana dekosentrasi besarannya lebih dari jumlah kerusakan yang ada.
2. Pemerintah daerah menerapkan undang-undang tentang pembatasan jumlah kendaraan pribadi, dan pembatasan kredit sepeda motor agar jumlah kendaraan pribadi dapat dikurangi, dan dapat mengurangi emisi.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel yang lebih khusus dalam penurunan kualitas lingkungan seperti, industri, kinerja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan Evies*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Astra, I. M. (2010). Energi Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan . *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika Vol. 11 No.2* , 131-139.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Transportasi Darat 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Transportasi Darat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Transportasi Darat 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Transportasi Darat 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019, April 7). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved From Badan Pusat Statistik:<https://www.bps.go.id/subject/26/Indeks-Pembangunan-Manusia.html#subjekviewtab2>
- Badan Pusat Statistik. (2019, Maret Rabu). *SIRUSA, Sistem Informasi Rujukan Statistik*. Retrieved From Badan Pusat Statistik <https://sirusa.bps.go.id/index.php?R=Indikator/View&Id=85>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Kependudukan*. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik. (N.D.). *Trasportasi*. Jakarta: Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik.

- Ekadinata A, Zulkarnain MT, Widyati A, Dewi S, Rahman S, van Noordwijk M. 2012. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan di Indonesia tahun 1990, 2000 dan 2005. Brief No.29. Bogor (ID): World Agroforestry Centre – ICRAF [internet]. [diunduh pada 2019 Juli 20]; Tersedia pada <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/policybrief/PB0053-12.pdf>
- Fakher, H. A. (2019). Investigating the determinant factors of environmental quality (based on ecological carbon footprint index). *Environmental Science and Pollution Research*, 10276–10291.
- Federal Environment Agency. (2007). *Analysis Of The Yale Environmental Performance Index (EPI)*. Berlin: Federal Environment Agency.
- Frinal, T., & Saputra, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Moda Transportasi Dan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta Tahun 2000-2010 . *Jurnal Bumi Indonesia Vol 2 No 2* , 252-259.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika (5 Ed.)*. Jakarta: Salemba 4.
- Hadi , S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan . *PERSPEKTIF Volume XVIII No. 3* , 169-179.
- Halkos, G. E., & Paizanos, E. A. (2016). The Channels Of The Effect Of Government Expenditure On The Environment: Evidence Using Dynamic Panel Data. *Journal Of Environmental Planning And Management*, 2-23.
- Haryanto H. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan PDRB Per Kapita terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2011-2013 [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Jati, K. P., Sugiyanto, H., & Muryani, C. (2017). Dampak Penambangan Minyak Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora). *Jurnal Geoeco ISSN: 2460-0768 Vol. 3, No. 1* , 58-67 .
- Jayanti, E. (2017). Hubungan Pertumbuhan Penduduk Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera . *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia Volume 4 Nomor 2* , 136-155.
- Keman, S. (2005). Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman . *Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1* , : 29-42.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017). *Kajian Penggunaan Faktor Emisi Lokal (TIER 2) Dalam Inventarisasi GRK Sektor Energi*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Strategi Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Hijau*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2018). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2013). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2014). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2015). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2016). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2017). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup, di download dari jdih.menlh.go.id
- Kementerian Perhubungan. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2018). *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan (5 Ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Kurdi , S. Z. (2008). Pengaruh Emisi Co2 Dari Sektor Perumahan Perkotaan Terhadap Kualitas Lingkungan Global. *Jurnal Permukiman* , 137-150.
- Kusminingrum, N., & Gunawan, G. (2008). Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor Di Jalan Perkotaan Pulau Jawa Dan Bali .
- Kusumawardhani, V., Sutjahjo, H. S., & Dewi, K. I. (2016). Penyediaan Perumahan dan Infrastruktur Dasar di Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung). *Jurnal Arsitektur NALARs* , 13-24.
- Ningrat, A. K., Kusuma, I. W., & Adnyana, I. B. (2016). Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Peralite Terhadap Akselerasi Dan Emisi Gas Buang Pada Sepeda Motor Bertransmisi Otomatis. *Jurnal METTEK*, 59-67.
- Nurhayati, S. F. (2001). Permasalahan Dan Konsekuensi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1*, 14-28.
- Orchidea, M. D., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Dana Dekonsentrasi Terhadap Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Vol. 6 No. 2*, 200-210.
- Prasetro, P. E. (2012). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Pujianti, A., Santosa, P. B., Sarungu, J., & Soesilo, A. (2015). The Determinants Of Green And Non Green City: An Empirical Research In Indonesia . *American International Journal Of Contemporary Research Vol. 3 No. 8*, 83-94.
- Purba, E. S., & Yunita, S. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup . *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 57-71.
- Reksohadiprodjo, S., & Brodjonegoro, A. P. (2000). *Ekonomi Lingkungan (Suatu Pengantar)* (2 Ed.). Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, didownload dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Ristanto A. 2013. Analisis kualitas lingkungan hidup kota sedang dan kecil di Kalimantan [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Saka, A. (2014). Urban Population Growth And The Environment In China: An Investigation . *Advances In Management & Applied Economics*, 137-149.
- Salim, A. (2016). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Graindupersada.
- Samimi, A. J., Kashefi, A., Salatin, P., & Lashkarizadeh, M. (2011). Environmental Performance And HDI: Evidence From Countries Around The World. *Middle-East Journal Of Scientific Research* , 294-301.
- Soesilowati, E. (2015). *Kota Dan Pemukiman Kebijakan Hingga Implementasi*. Semarang: UNNES PRESS.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Teori & Empirikal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Suparmoko, M., & Suparmoko, M. R. (2007). *Ekonomika Lingkungan edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Susetyo, D. (2007). Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 88-105.
- Tahzib, I. B., & Zvijáková, I. L. (2012). Environmental Impact Of Land Transport . 70-77.
- Ulfa, M., Zulfan, & Hum, M. (2018). PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SANITASI LINGKUNGAN (Studi di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* .
- United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016*. New York: United Nations Development Programme .
- Vinod Thomas dkk,2002. *The Quality Of Growth:Kualitas Pertumbuhan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Vinod, T. (2001). *The Quality Of Growth = Kualitas Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widarjono, A. (Yogyakarta). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panaduan Eviews*. 2016: UPP STIM YKPN.

Yuliasuti , N., & Fatchurochman, A. (2012). Pengaruh Perkembangan Lahan Terbangun Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman . *Jurnal Presipitasi*, 10-16.

Yuliasuti, N., & Fatchurochman , A. (2012). Pengaruh Perkembangan Lahan Terbangun Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Kelurahan Tembalang) . *Jurnal Presipitasi Vol. 9 No.1*, 10-16.